

# IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Wiredarme, Marzuki, Suhardi, I Gusti Ngurah Suwetha \*)

## ***Abstrak***

*NTB gencar mengembangkan pariwisata halal dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015, tentang Wisata Halal, dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pariwisata Halal. Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu meraih sertifikasi pariwisata halal tingkat internasional. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Menurut Badan Pusat Statistik NTB, jumlah kunjungan wisatawan pada 2015 mencapai 2,2 juta wisatawan, setelah wisata halal dikembangkan. Kesiapan sumber daya manusia dan komponen pariwisata untuk mengembangkan pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memadai, dan mendapat respon positif dari masyarakat, namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas agar mempunyai daya saing di tingkat global. Selain itu, pariwisata halal yang dikembangkan di Nusa Tenggara hanya baru sebatas pada produk makanan dan minuman yang bersertifikat halal, serta hotel saja, sedangkan pada turis atau wisatawan yang berkunjung, belum terikat pada ketentuan halal. Pemahaman tentang “wisata halal” belum spesifik. Wisata halal baru sebatas pada ketersediaan makanan dan minuman bersertifikat halal, dan fasilitas hotel yang memisahkan antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Berbagai sumber daya masih harus terus*

\*) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat

*ditingkatkan dan kategorisasi halal lebih spesifik, sehingga wisatawan yang berkunjung ke NTB tidak merasa bingung, apakah wisata halal hanya berlaku untuk muslim saja atau untuk semua wisatawan.*

**Kata Kunci:** *Wisata Halal, Pariwisata Halal*

## **Pendahuluan**

Pariwisata masih memendam potensi yang sangat besar. Jika diberdayakan oleh setiap daerah, sektor pariwisata dapat memberikan masukan untuk pemerintah, pendapatan masyarakat, sekaligus akan meningkatkan devisa negara. Menurut data Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) dan WTTC 2015, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 9,8% Produk Domestik Bruto (PDB) global, kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US\$ 7,58 triliun. *Foreign exchange earning* sektor pariwisata tumbuh 25,1%, dan pariwisata membuka lapangan kerja yang luas; 1 dari 11 lapangan kerja ada di sektor pariwisata.

Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan pariwisata merupakan yang paling mudah menciptakan lapangan kerja (*pro-job*) pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), dan melestarikan lingkungan hidup (*pro-environment*). Dalam konteks ini, pariwisata memiliki prinsip “Semakin dilestarikan, Semakin Menyejahterakan”.

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Indonesia menyadari pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian. Pertumbuhan sektor pariwisata ini di Indonesia selalu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, atau disebut juga sebagai nusantara atau negara maritim, Indonesia mempunyai banyak potensi pariwisata. Berdasarkan pemahaman yang demikian di dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia, maka perlu ada terobosan yang lebih jitu, guna menarik minat berwisata ke Indonesia. Program membangun “Bali Baru”, seperti dicanangkan pemerintah pusat, memperkenalkan “10 Bali Baru”.

Ada 10 (sepuluh) destinasi wisata yang tak kalah dari Bali dan dipromosikan ke mancanegara. Adapun kesepuluh destinasi itu, adalah: Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung

di Banten, Kabupaten Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo, Tengger dan Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Morotai di Maluku Utara.

Istilah “10 Bali Baru” itu merupakan makna kiasan dan lebih untuk memberi tekanan agar “*performance*” masing-masing daerah itu bisa menyamai Bali yang setahun mampu mendatangkan empat juta wisatawan mancanegara.<sup>1</sup> Selanjutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengemukakan rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 di bidang pariwisata akan mengembangkan 3 kawasan dari sepuluh yang diunggulkan, antara lain: *Pertama*, pengembangan Danau Toba; *Kedua*, pengembangan Borobudur, dan sekitarnya; *Ketiga*, pengembangan Mandalika dan sekitarnya.

Menyimak hal itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, sangat gencar meningkatkan pembangunannya di dalam pertumbuhan ekonominya, melalui sektor kepariwisataan, betapa tidak Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kepariwisataan yang sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Letak Nusa Tenggara Barat dengan objek Mandalika, sangat strategis di bidang pariwisata. Di sebelah barat ada Pulau Bali, sebagai daerah tujuan wisata yang sudah mendunia, sedangkan sebelah timur ada objek tujuan wisata dunia juga Nusa Tenggara Timur, dengan Pulau Komodonya, yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Oleh pemerintah pusat, kedua daerah (Komodo dan Mandalika) ini masuk 10 destinasi pariwisata baru yang menjadi skala prioritas unggulan untuk bisa mendatangkan kunjungan pariwisata dalam setiap tahunnya, sehingga diharapkan mampu menyedot kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Untuk mendukung kunjungan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat yang lebih spesifik lagi, yaitu dengan mengembangkan Pariwisata Halal, mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mampu meraih sertifikasi “Halal” tingkat internasional beberapa tahun yang lalu. Maka dari itulah Nusa Tenggara Barat sedang gencar-gencarnya mengembangkan pariwisata halal, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015, tentang Wisata Halal, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pariwisata Halal.

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung

---

1 [lifestyle.liputan6.com/read/2445931/ini-dia-10-destinasi-wisata-yang-disebut-bali-baru](http://lifestyle.liputan6.com/read/2445931/ini-dia-10-destinasi-wisata-yang-disebut-bali-baru)

alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Dengan mulai dikembangkannya wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Data dari Badan Pusat Statistik BPS NTB menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan pada 2015, mencapai 2,2 juta wisatawan.

Jumlah itu diperoleh dari jumlah frekuensi penerbangan dalam setahun yang mencapai 11.535 untuk kedatangan dan 11.519 keberangkatan. Jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang pada tahun itu hanya mencapai 2.212 wisatawan. Selanjutnya menurut catatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Nusa Tenggara Barat, H Lalu Moh. Faozal mengatakan, sampai saat ini, kunjungan wisatawan telah mencapai 2,9 juta. Artinya, sampai akhir 2016, target 3 juta wisatawan optimis akan tercapai. Wisatawan Nusantara (Wisnus) ada diangka 1,5 juta orang. Sedangkan Wisatawan Mancanegara (Wisman) juga pada angka 1,5 juta orang, di Dominasi Malaysia dan Australia.<sup>2</sup>

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan komponen pariwisata untuk mengembangkan “Pariwisata Halal”?; *Kedua*, bagaimana “Pariwisata Halal” yang ingin dijalankan di Nusa Tenggara Barat?

## Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya pendekatan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap dan membahas obyek penelitian.

Menurut *World Tourism Organization (WTO)*, pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Mathieson & Wall (1982), pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam

---

2 (wawancara pada tgl 13 Juli 2017).

perjalanan maupun di lokasi tujuannya.

Menurut Swarbrooke (1996: 99) terdapat beberapa jenis pengembangan pariwisata yaitu :

- a. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakanebagai atraksi ;
- b. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi ;
- c. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru ;
- d. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung ;
- e. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di mana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Kemudian jika merujuk pada pendapat Richardson (dalam Syafri Wirman, 2013) mengemukakan tentang ciri-ciri pokok dari pariwisata, yaitu :

1. adanya unsur travel (perjalanan) yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya;
2. adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal biasa; dan,
3. tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut, bukan untuk mencari pendapatan atau pekerjaan di tempat yang dituju.

Mathieson dan Wall (dalam Syafri Wirman, 2013: 36) mengatakan, bahwa pariwisata mencakup tiga hal, yaitu:

1. *adynamic element*, yaitu travel ke suatu tempat tujuan wisata ;
2. *astatic element*, yaitu singgah di daerah tujuan wisata, dan
3. *aconsequential element*, akibat dari dua hal di atas (khususnya masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Selanjutnya teori ini telah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015, tentang Wisata Halal, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pariwisata Halal.

Yang dimaksud dengan wisata halal, menurut Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, adalah: "kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas, produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah".

Untuk membahas ini peneliti menggunakan teori kebijakan publik menurut Edwards III. Edwards III menunjukkan empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap, dan (4) struktur birokrasi.

## Hasil dan Pembahasan

Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 10 (sepuluh) Daerah Kabupaten/ Kota, yaitu :

- Pulau Lombok : Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara,
- Pulau Sumbawa : Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.

Di samping itu Nusa Tenggara Barat, memiliki banyak pulau baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, namun sangat berpotensi untuk dikembangkan sumber daya alamnya, Adapun pulau-pulau tersebut, sesuai dengan table di bawah ini.

Tabel : 1  
 Banyaknya Pulau yang Berpendhuni dan Tidak Berpendhuni  
 Menurut Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota	Pulau Berpendhuni	Pulau Tidak Berpendhuni	Jumlah Total
1. Lombok Barat	9	26	35
2. Lombok Utara	3	-	3
3. Lombok Tengah	-	20	20
4. Lombok Timur	5	30	35
5. Sumbawa Barat	-	15	15
6. Sumbawa	5	57	62
7. Dompu	1	22	23
8. Bima	9	75	84
9. Kota Mataram	-	-	-
10. Kota Bima	-	-	-
Jumlah / Total	35	245	280

Sumber : Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam (96%). Tingkat pertumbuhan penduduk kurang lebih 1,42 persen per tahun dari 4, 5 juta jiwa lebih penduduk NTB. Mata pencaharian penduduk Nusa Tenggara Barat, sebagian besar pada sektor pertanian dalam arti luas, kemudian sektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga.

Dengan lebih dari empat juta penduduk NTB tersebut dinamika kehidupan sosial masyarakat di provinsi ini amat dinamis. Warga NTB yang ramah dan terbuka, hidup berdampingan secara harmonis. Kendati masyarakat NTB terdiri dari tiga suku bangsa utama, mereka hidup dalam kerukunan dan keselarasan jalinan sosial kemasyarakatan. Dua dari tiga suku bangsa di NTB, adalah penduduk asli Pulau Sumbawa. Mereka disebut Tau Samawa atau orang Sumbawa, dan suku lainnya adalah Mbojo, yaitu masyarakat asli di Bima dan Dompu. Sedangkan penduduk asli Pulau Lombok adalah orang Sasak. Meskipun hidup dalam adat dan kebiasaan berlainan, masyarakat NTB memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang turun-temurun dan terpelihara. Bahkan NTB sejak lama juga ditinggali oleh lebih dari satu suku bangsa pendatang.<sup>3</sup>

3 [www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat), diun-

## Kebudayaan dan Kesenian

Kebudayaan dan kesenian suatu daerah, adalah merupakan sumber daya yang tak ternilai harganya, yang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, lebih-lebih daya tarik itu dijadikan daya tarik tersendiri di bidang kepariwisataan. Pemerintan Daerah Nusa Tenggara Barat, sangat apresiatip terhadap kebudayaan dan kesenian guna dapat menumbuhkan daya tarik di bidang kepariwisataan. Peneliti menemukan dan menyajikan beberapa kebudayaan dan kesenian dari Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

- (1) Rumah Adat; Rumah adat NTB bernama Dalam Loka Samawa. Berupa rumah panggung yang dibuat dari kayu jati. Terdiri dari dua lantai dengan beberapa ruangan seperti balairung, serambi depan, ruang keluarga sultan dan dapur.
- (2) Pakaian Adat; Pakaian adat Sasak bagi perempuan disebut Lambung. Yaitu baju tanpa lengan dengan kerah berbentuk huruf “V” dan sedikit hiasan di bagian gigir baju. Pakaian ini menggunakan bahan kain pelung. Sabuk anteng (ikat pinggang) yang dililitkan dan bagian ujungnya yang berumbai dijuntaikan di pinggang sebelah kiri. Bawahannya memakai kain panjang sampai lutut atau mata kaki dengan bordiran di tepi kain dengan motif kotak-kotak atau segitiga. Sebagai tambahan aksesoris, ditambahkan sepasang gelang dan gelang kaki berbahan perak. Sowang (anting-anting) berbentuk bulat terbuat dari daun lontar. Rambut diikat rapi dan sebagai akses diselipkan bunga cempaka dan mawar, atau bisa juga disanggul dengan model punjung pliset. Untuk pakaian adat pria dari mulai kepala mengenakan ikat kepala yang disebut capuq atau sapuk, sekilas melihat bentuk sapuk sasak tidak jauh berbeda dengan ikat kepala dari Bali. Sapuk untuk penggunaan sehari-hari selembar kain tenun berbentuk segitiga sama kaki, sedangkan untuk keperluan upacara adat atau ritual khusus biasanya menggunakan sapuk jadi atau perade yang berbahan Songket Benang Mas. Kemudian pria Sasak menggunakan pegon sebagai baju. Pegon merupakan variasi dari jas Eropa.
- (3) Tari Tradisional; Banyak tari tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, diantaranya yaitu Tari Lenggo dan Tari Batu Nganga. Tari Lenggo ada dua jenis yaitu Tari Lenggo Melayu Dan Lenggo Mbojo. Tari Siwe (tari perempuan), yaitu jenis tari yang dimainkan oleh para penari perempuan seperti lenggo siwe (lenggo Mbojo), toja, lingsara, katubu dan karaenta. Tari Mone (tari laki-laki), yaitu jenis tari yang dimainkan oleh penari laki-laki, seperti kanja, sere, soka, manca, lenggo mone (lenggo melayu) dan mpa’a sampari. Lalu Tari Batu Nganga dimana Tari Batu Nganga merupakan

---

duh tgl. 13-6-2017)

sebuah tari berlatar belakang cerita rakyat yang mengisahkan tentang kecintaan rakyat terhadap putri raja yang masuk batu dan permohonan mereka agar sang putri dapat keluar dari dalam batu.

- (4) Kerajinan Asal NTB; Provinsi ini memiliki banyak kerajinan tangan yang berasal dari daerah ini diantaranya Gerabah Banyumulek dan Kain Tenun khas Nusa Tenggara Barat. Gerabah Banyumulek adalah kerajinan tangan khas Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan alat berupa lempengan bulat yang dapat diputar dengan tangan. Dan dapat terbuat dari bahan tanah liat dan tanah liat tersebut dibentuk dengan alat pemutar, setelah jadi tanah liat yang tadi sudah dibentuk dijemur dan dibakar.

Kain songket merupakan kain tenunan yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan, hiasan dibuat dengan menyisipkan benang perak, emas atau benang warna di atas benang lungsi. Terkadang juga ada yang dihiasi dengan manik-manik, kerang atau uang logam.

- (5) Upacara Adat; Ada beberapa upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat NTB untuk memperingati hari-hari tertentu seperti: Upacara U'a Pua dan Upacara Perang Topat.

- a) Upacara U'a Pua merupakan sebuah tradisi masyarakat Lombok yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Upacara U'a Pua dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang juga dirangkai dengan penampilan atraksi Seni Budaya masyarakat Suku Mbojo (Bima) yang berlangsung selama 7 hari. Prosesi U'a Pua diawali dengan Pawai dari Istana Bima yang diikuti oleh semua Laskar Kesultanan, Keluarga Istana, Group Kesenian Tradisional Bima dengan dua Penari Lenggo yang dilengkapi dengan Upacara Ua Pua. Selama proses pawai berlangsung Group Kesenian terus memainkan Genda Mbojo, Silu dan Genda Lenggo. Ketika memasuki Istana, Penunggang Kuda menari dengan suka ria (Jara Sara'u), Sere, Soka dan lain-lain sampai Ketua Rombongan bertemu dengan Sultan yang diiringi dengan Penari Lenggo. Pada sa'at itu diserahkan "Sere Pua" dan Al-Qur'an kepada Sultan.
- b) Upacara Perang Topat adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh orang Sasak. Perang Topat adalah upacara ritual sebagai perwujudan rasa terima kasih kepada Tuhan atas kemakmuran berupa tanah yang subur, banyak hujan. Upacara Perang Topat ditampilkan di Halaman Pura Lingsar oleh Masyarakat Hindu, Masyarakat Sasak dengan saling melemparkan Topat (Ketupat). Upacara ini merupakan akulturasi antara budaya Sasak dengan budaya Hindu, yang berlangsung setelah selesai "Pedanda/Sulinggih" (Pemimpin upacara Agama Hindu) memuja yaitu selama periode "Rokok Kembang Waru" sekitar pukul 17.30. Perang

Topat dilaksanakan setiap tahun pada saat Purnama ke 6 menurut Kalender Sasak atau sekitar Bulan Nopember –Desember.

- (6) Alat Musik; NTB pun memiliki banyak alat musik tradisional yang berasal dari daerah ini, kali ini peneliti akan membahas beberapa alat musik di antaranya :
- a) Genggong pada umumnya hanya memainkan lagu-lagu yang berlaras Slendro. Untuk membunyikannya, genggong dipegang dengan tangan kiri dan menempelkannya ke bibir. Tangan kanan memetik lidahnya dengan jalan menarik tali benang yang diikatkan pada ujungnya. perubahan nada dalam melodi genggong dilakukan dengan mengolah posisi atau merubah rongga mulut yang berfungsi sebagai resonator.
  - b) Idiokordo adalah Alat musik yang seperti siter berdawai tiga dengan cara di petik. Alat musik ini disebut juga Tatabahan.
  - c) Sarone adalah sebuah alat musik tiup. Alat musik ini termasuk golongan aerofon yang berlidah. Sarone, dibuat dari dua bahan pokok yaitu buluh ( jenis bambu kecil) dan daun lontar. Terdapat lubang di alat musik ini, ada yang berlubang 5 bahkan 6.
- (7) Tari Tradisional; Banyak tari tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, diantaranya yaitu Tari Lenggo dan Tari Batu Nganga. Tari Lenggo ada dua jenis yaitu Tari Lenggo Melayu Dan Lenggo Mbojo. Tari Siwe (tari perempuan), yaitu jenis tari yang dimainkan oleh para penari perempuan seperti lenggo siwe (lenggo Mbojo), toja, lensara, katubu dan karaenta. Tari Mone (tari laki-laki), yaitu jenis tari yang dimainkan oleh penari laki-laki, seperti kanja, sere, soka, manca, lenggo mone (lenggo melayu) dan mpa'a sampari. Lalu Tari Batu Nganga dimana Tari Batu Nganga merupakan sebuah tari berlatar belakang cerita rakyat yang mengisahkan tentang kecintaan rakyat terhadap putri raja yang masuk batu dan permohonan mereka agar sang putri dapat keluar dari dalam batu.
- (8) Kerajinan Asal NTB; diantaranya Kain Tenun khas Nusa Tenggara Barat. Gerabah Banyumulek yang dibuat dengan alat berupa lempengan bulat yang dapat diputar dengan tangan. Dan dapat terbuat dari bahan tanah liat dan tanah liat tersebut dibentuk dengan alat pemutar, setelah jadi tanah liat yang tadi sudah dibentuk dijemur dan dibakar. Kain songket merupakan kain tenunan yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan, hiasan dibuat dengan menyisipkan benang perak, emas atau benang warna di atas benang lungsi. Terkadang juga ada yang dihiasi dengan manik-manik, kerang atau uang logam.<sup>4</sup>

4 [www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat), diunduh tgl.14-6-2017).

- (9) Wisata Halal; sesuai dengan visi dan misi daerah Nusa Tenggara Barat yang religious dan berbudaya, maka pariwisata yang dikembangkan, adalah “Pariwisata Halal”, mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil mendapat predikat sertipikan halal tingkat internasional pada tahun 2015. Maka dengan demikian Nusa Tenggara Barat konsen mengembangkan Pariwisata Halal, terutama menyangkut: Hotel, transportasi dan makanan/ kuliner, wajib berlabel “Halal”. Hal ini dimaksudkan, adalah untuk menarik minat para turis dari Timur Tengah yang ingin berwisata ke Indonesia tidak ragu datang ke Nusa Tenggara Barat.

### Obyek Wisata

lokasi-lokasi yang menjadi tujuan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut :

- (1) Pantai Senggigi; terletak kurang lebih 12 kilometer dari pusat kota Mataram (Ibukota Provinsi NTB). Pesisir pantai ini masih cukup asri dan pemandangan bawah lautnya cukup indah, sehingga kita dapat melakukan aktivitas snorkeling atau kano ketika ombak tidak terlalu besar. Suasana romantis pun dapat kita temukan saat matahari terbenam dipantai ini. Di sekitar pantai senggigi yang terbentang sepanjang 10 km ini dapat kita temukan berbagai hotel berbintang serta hotel kelas melati yang harganya cukup terjangkau. Selain itu, terdapat juga café, night club, serta pasar seni senggigi yang berada di wilayah jalan raya Senggigi.
- (2) Batu Bolong; berada di wilayah Pantai Senggigi, tempat ini merupakan batu karang yang terdapat lubang ditengahnya sehingga dinamakan Batu Bolong. Terdapat sebuah Pura yang dijadikan sebagai tempat sembahyang para umat Hidhu. Keunikan batu karang yang bolong itu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan. Dan dari sini pula dapat terlihat pemandangan Gunung Agung yang berada di Bali.
- (3) Gili Trawangan; di Lombok terdapat pulau-pulau kecil atau sering disebut gili oleh masyarakat Lombok dan sekitarnya. Ada 3 (tiga) gili yang terkenal di pulau Lombok, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, serta Gili Air. Gili Trawangan merupakan gili terbesar dari ketiga gili yang ada dengan panjang 3 km dan lebar 2 km. Tempat ini dapat ditempuh sekitar setengah jam dari Bangsal (sebuah dermaga yang terletak di wilayah Senggigi). Pulau ini terkenal dengan julukan ‘Party Island’ karena suasana pesta dapat kita jumpai setiap malam. Selain itu, panorama bawah laut yang indah serta gradasi pantainya, membuat pulau ini sering dikunjungi dan dijadikan tempat *diving* oleh wisatawan, baik lokal maupun asing. Di pulau ini tidak terdapat kendaraan bermotor karena sarana transportasi yang biasa digunakan adalah

sepeda serta cidomo (kereta kuda).

- (4) Taman Narmada; tempat ini terkenal karena terdapat sumber air yang dikatakan sebagai sumber air awet muda karena banyak yang percaya bahwa air tersebut berkhasiat untuk awet muda. Taman Narmada terletak di 10 kilometer dari pusat kota. Konon, tempat ini merupakan replika dari Gunung Rinjani dan dibangun oleh Raja Anak Agung Gde Ngurah Karangasem. Tempat ini dibangun karena raja tersebut sudah terlalu tua dan tidak dapat melakukan ritual di Gunung Rinjani lagi. Taman ini terdiri dari beberapa bangunan yang dulu digunakan sebagai tempat peristirahatan raja.
- (5) Gunung Rinjani; gunung tertinggi ketiga (3.762 meter dpl) di Indonesia, di bagian utara Pulau Lombok. Gunung ini menjadi salah satu gunung terfavorit bagi para tracking atau pendaki gunung karena keindahan panoramanya serta keindahan Danau Segara Anak yang terletak di tengah-tengah gunung tersebut.
- (7) Air Terjun Sendang Gile; memiliki ketinggian sekitar 31 meter, sehingga debit airnya cukup deras, berada dalam kawasan Gunung Rinjani. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dari kota Mataram. Untuk dapat menikmati keindahan pemandangan harus melewati sekitar 315 anak tangga.
- (8) Pura Lingsar; objek wisata historikal dan budaya di daerah Lombok Barat, dibangun sekitar tahun 1759 oleh Anak Agung Ngurah Raja Karangasem (Bali). Terdapat mata air yang dianggap suci dan dipercaya mampu memberikan peruntungan. Bila ikan julit (mirip belut) yang berumur ratusan tahun, kebetulan keluar, ini menandakan kebaikan bagi wisatawan itu.
- (9) Taman Air Mayura; awalnya bernama Taman Istana Kelepu adalah paduan unik dan khas dari konsep taman, kolam serta pura, kental dengan corak Bali, Jawa dan Lombok. Dibangun pada tahun 1744 oleh Raja A.A. Made Karangasem dan direnovasi sekitar tahun 1866. Kata mayura berarti burung merak dari Bahasa Sansekerta.<sup>5</sup>

### **Data Kunjungan Wisatawan**

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat semakin berbenah di sektor kepariwisataan. Data menunjukkan dari tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data statistic kunjungan turis ke daerah Nusa Tenggara Barat sebagai data tersaji di bawah ini.

---

5 [www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat), diunduh tgl.14-6-2017).

## Banyaknya Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2013

Jenis Wisatawan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wisatawan Mancanegara	232 525	282 161	364 196	471 706	565 944
Wisatawan Nusantara	386 845	443 227	522 684	691 436	791 658
Jumlah/Total	619 370	725 388	886 880	1 163 142	1 357 602

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Lalu Moh. Faozal, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan itu, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2018.

### Sertifikat Halal

Bentuk implementasi Keputusan Gubernur tentang wisata halal, komponen pariwisata Nusa Tenggara bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membangun kerjasama di dalam memajukan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat.

Dari catatan MUI Nusa Tenggara Barat, untuk hotel dan restoran yang telah mengantongi sertifikat halal, antara lain: 1).Hotel Lombok Plaza, 2). Golden Tulip, 3).Lombok Raya, 4). Lombok Garden, 5). Hotel Santika, 6).Golden Palace 7). Hotel Jayakarta, 8). Bukit Senggigi, dan 9). Grand Legi.

Ketua ASITA Nusa Tenggara Barat, Dewantoro Umbu Djoka<sup>6</sup>, menjelaskan bahwa ASITA Nusa Tenggara Barat selalu aktif untuk mengembangkan perkembangan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Dicontohkan. Ketika pelaksanaan MTQ.tingkat nasional di Kota Mataram, ASITA Nusa Tenggara Barat proaktif untuk mempromosikan pariwisata halal Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menggelar *International Halal Travel Fair (IHTF)* di Lombok, Rabu (21/9) hingga Kamis (22/9), hal ini menunjukkan, bahwa ASITA Nusa Tenggara Barat selalu mendukung dan bersinergis secara sungguh-sungguh dengan semua komponen pariwisata dan dengan Pemerintah Daerah untuk memajukan pariwisata halal.

Untuk memantapkan program pembangunan kepariwisataan, pemerintah

6 wawancara, tgl 29 Agustus 2017)

Nusa Tenggara Barat, meluncurkan branding dan event pariwisata tahun 2016 dengan Slogan, yaitu: “Pesona Lombok dan Sumbawa”.

## Pembahasan

Berdasarkan jenis-jenis pengembangan kepariwisataan, sangat perlu memperhatikan jenis-jenis pengembangan untuk dicermati dan diimplementasikan, mengingat di sektor pariwisata sangat dibutuhkan adanya inovasi-inovasi baru, sehingga para turis yang berkunjung merasa puas dan tertarik dengan inovasi-inovasi yang mereka saksikan. Untuk pengembangan kepariwisataan, tidak bisa dilepaskan dari perencanaan kepariwisataan.

“... bahwa “pembangunan pariwisata akan melibatkan dua sektor, yakni sektor public dan sektor swasta” (Syafri Wirman, 2013 : 62).

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan inovasi diantaranya dengan mengembangkan Wisata Halal, sebagai mana telah dituangkan dalam kebijakan publiknya, berupa Peraturan Gubernur Nomor : 51 Tahun 2015, tentang Wisata Halal, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pariwisata Halal.

Menindak lanjuti kebijakan tersebut, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mengimplementasikan pengembangan pariwisata mengacu pada teori tersebut di atas. Menurut keterangan dari Ketua BPPD. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua Tim Percepatan Promosi Pariwisata Daerah (Taufan Rahmadi), pengembangan kepariwisataan di daerah ini, meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Sedangkan usaha pariwisata di daerah ini, dilakukan melalui : daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konprensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramu wisata, wisata tirta dan spa.

Guna memahami implementasi pengembangan pariwisata halal, Model Edwards III (2003: 12) menunjukkan ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap, dan (4) struktur birokrasi. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terbangun antara Legeslatif dengan Eksekutif dalam hal ini dengan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, sebagai leading sektor kepariwisataan sangat intens, lancar, dan saling memberikan informasi sesuai dengan bidang masing-masing. Komunikasi yang intens antara eksekutif

dengan legeslatif berjalan sangat baik, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat, .nomor 51/2015 segera ditingkatkan sebagai Perda Nomor ; 2 Tahun 2016, tentang Wisata Halal, sebagai payung hukum bagi semua yang terkait di dalam pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, terayomi, serta mempunyai arah yang jelas. Begitu pula halnya dengan para pihak yang bergerak dalam bidang pariwisata, terjalin komunikasi yang saling mengisi antara masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat, merupakan upaya terbangunnya komunikasi, antara pemerintah, masyarakat dan para pelaku pariwisata di daerah ini. Komunikasi yang terbangun di Nusa Tenggara Barat dalam kaitannya dengan kemajuan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. terus terbangun dengan baik, saling tukar informasi guna mencapai kemajuan kepariwisataan di daerah Nusa Tenggara Barat.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata “halal” di Nusa Tenggara Barat, Badan Promosi Pariwisata selalu proaktif dengan lowyer sehingga wisata halal di Nusa Tenggara Barat. dikenal dunia international. Dengan demikian dapat diharapkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Baarat, dapat mencapai target tiap tahunnya.

Dukungan dari pihak Legislatif juga tidak kalah pentingnya di dalam pengembangan pariwisata halal di daerah Nusa Tenggara Barat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mendukung Eksekutif dan Instansi yang menangani kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. DPRD Nusa Tenggara Barat sangat mendukung dan mendorong eksekutif beserta jajarannya yang menangani sektor kepariwisataan mulai dari regulasi, penganggaran dan promosi pariwisata selalu didukung untuk proses percepatan tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan dalam pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat, pemerintah selalu berkoordinasi dengan semua pihak, terutama dengan MUI, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Kesehatan dan instansi dinas yang terkait lainnya. Selain itu perlu juga dibangun suasana yang kondusif atau keamanan, dan kenyamanan, terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan pariwisata mulai dari pusat-pusat kedatangan pariwisata (Bandara, pelabuhan maupun obyek pariwisata), perlu menjadi perhatian sektor publik, sehingga mereka yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Nusa Tenggara Barat merasa aman dan nyaman selama berada di daerah Nusa Tenggara Barat.

2. Sumber daya akomodasi sebenarnya sudah memadai sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan

untuk mempunyai daya saing di tingkat global. Diperlukan kreativitas dan inovasi untuk menarik perhatian wisatawan baik dalam dan luar negeri. Berkenaan dengan hal itu Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat yang merupakan 10 destinasi pengembangan pariwisata yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan sudah diresmikannya Mandalika sebagai “(KEK) Kawasan Ekonomi Khusus” oleh Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu, maksudnya adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Nusa Tenggara Barat, melalui pengembangan sektor pariwisata.

Menyikapi hal ini Pemerintah Daerah hendaknya berpacu untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, untuk mendukung dan menyukseskan program ini. Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu sumber daya yang harus selalu bergerak mengikuti selera pasar, harus terus digaungkan hingga ke manca negara, serta mampu berinovasi di dalam pengembangan pariwisata. Adapun tugas dari pada BPPD antara lain: (1). Meningkatkan citra kepariwisataan Inonesia, (2). Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, (3). Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, (4). Menggalang pendanaan dari sumber lain selain APBN,dan APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan (5). Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat memberi andil dan apresiasi yang penting terhadap pengembangan wisata Halal di Nusa Tenggara Barat. Peran MUI sangat diharapkan untuk mentransfer informasi dari pemerintah kepada masyarakat muslim dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan. MUI pun mengharapkan Pemerintah Daerah lebih memberdayakan *Islamic Center* yang ada di Kota Mataram sebagai tempat/akomodasi bagi umat muslim yang kebetulan berwisata ke Lombok, untuk memanfaatkan Gedung Islamic Center ini sebagai akomodasi selama berwisata di pulau Lombok.

Ada 3.816 pegawai yang ada di seluruh daerah Nusa Tenggara Barat, ditambah dengan sumber daya aparatur yang menangani kepariwisataan didukung oleh 167 orang pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan public, khususnya di sektor pariwisata, memegang peranan penting di sektor pembangunan kepariwisataan juga menjadi perhatian Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dibangun Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), oleh Kementerian Pariwisata Pusat. Tujuannya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor kepariwisataan. Dan infra strukturnya

tahun 2017 ini sudah mulai dibangun dengan membangun Kampus STP. Dari segi sumber daya manusianya di sector pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, tidak menemui kendala yang berarti, artinya sudah sangat mendukung terhadap pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

3. Disposisi atau sikap para pejabat pelaksana kebijakan publik di jajaran Pemda Nusa Tenggara Barat, khususnya yang menangani di sektor kepariwisataan sangat sigap dan cekatan dalam mengimplementasikan kebijakan Gubernur tentang pelaksanaan program wisata halal. Implementasi kebijakan pengembangan wisata halal, tidak lepas dari pengaruh pandangan dan sikap pelaksana kebijakan. Setiap komponen dari model yang dibahas harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Elemen-elemen dari respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan, arah respon para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas respon tersebut. Arah disposisi pelaksana kebijakan terhadap standar dan tujuan juga penting. Pelaksana kebijakan mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak tujuan yang terkandung di dalam kebijakan tersebut. Sebaliknya, penerimaan secara luas terhadap standar-standar kebijakan dan tujuan, pada mereka yang bertanggung jawab akan meningkatkan potensi untuk mensukseskan pelaksanaan Intensitas disposisi pelaksana dapat juga mempengaruhi kinerja kebijakan. Sikap kurang intens dapat menyebabkan pengalihan pelaksana kebijakan untuk mencoba pasif dan menghindari dari pola yang lebih umum. Sikap para pejabat di jajaran Pemprov Nusa Tenggara Barat selalu bersinergi, baik di jajaran Pemerintah Provinsi, maupun bersinergi dengan Pemda, Kabupaten/Kota, se Nusa Tenggara Barat, untuk menyukseskan pembangunan di sektor pariwisata ini.

Dengan terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, merupakan suatu hal yang sangat strategis dikembangkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat. Badan Promosi ini merupakan perpanjangan tangan dan mitra Pemda Nusa Tenggara Barat dalam memajukan kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Kriteria akomodasi sesuai dengan standar “Syariah” sebagaimana dijelaskan oleh anggota DPRD. Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain menyangkut: (1) Produk, (2) Pelayanan, (3) pengelolaan. Semua itu harus mengandung halal. Seperti kriteria pelayanan, mulai dari kantor depan hotel diupayakan memenuhi syarat halal, menyiapkan perlengkapan dan ruangan untuk shalat, tersedianya makanan dan minuman yang berlabel halal dan sebagainya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Nusa Tenggara Barat juga sangat mengakomodir dan mendukung pengembangan pariwisata halal, sehingga MUI memegang peran yang sangat strategis untuk menjembatani antara masyarakat muslim dengan pemerintah dan juga dengan wisatawan religi di pulau Lombok khususnya.

4. Di sektor pariwisata terbentuk organisasi yang menangani promosi di bidang kepariwisataan daerah, khusus menangani promosi kepariwisataan, berupa sebuah badan, yang dibentuk untuk membantu pembangunan di sektor kepariwisataan, yaitu berupa Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor : 556-352 Tahun 2014.

Susunan Organisasi BPPD Nusa Tenggara Barat (2014 – 2017)

Jabatan	Nama	Instansi
Ketua	Taufan Rahmadi	APII NTB
Wakil Ketua	H. Ainuddin, SH, MH	HPI NTB
Sekretaris	H. Affan Ahmad	APINDO NTB
Anggota	DR. Halus Mandala	AKPAR Mataram
Anggota	DR. Prayitno Basuki	UNRAM
Anggota	I Gusti Lanang Patra	PHRI NTB
Anggota	Sudarmadi	Garuda Indonesia
Anggota	Awanadhi Aswinabawa	ASITA NTB
Anggota	L. Hasanudin	FWP NTB

Sumber : BPPD.NTB.

Tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakekatnya adalah melaksanakan secara operasional semua bentuk kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPPD itu sendiri maupun dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

Dengan bidang tugas yang sedemikian, kinerja sumber daya yang bergerak di sektor kepariwisataan di daerah Nusa Tenggara Barat pada dasarnya cukup potensial, dan sangat efektif di dalam memajukan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dan sasaran program yang menjadi focus Badan Promosi Daerah adalah:

1. Mempromosikan keunggulan potensi pariwisata Nusa Tenggara Barat, sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan bagi wisatawan dan masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata Nusa Tenggara Barat di pasar domestik dan internasional (*image branding*);
3. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang produk-produk wisata Nusa Tenggara Barat yang telah dikembangkan;
4. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers nasional maupun internasional.

#### Program Jangka Pendek BPPD NTB

1. Menetapkan Standard Promotion Plan & Strategy (SOP)
2. Menguatkan kinerja internal lembaga (Organisasi/Asosiasi, Pengurus & Eksekutif)
3. Tourism Media Center
4. Kemitraan dengan SKPD terkait di Pemerintah Provinsi NTB dan dengan masing – masing BPPD di Kabupaten dan Kota
5. Crisis Center Desk untuk mengantisipasi isu – isu negatif seputar dunia pariwisata NTB
6. Internet Marketing : web site, socmedia, email blast dan lain-lain.

Ada koordinasi yang intents antara organisasi pemerintah dengan Badan Penyelenggara Promosi Daerah Nusa Tenggara Barat, dan Organisasi yang bergerak di sector kepariwisataan, yang mengaktualisasikan bahwa “komunikasi” merupakan hal yang terus dilakukan baik komunikasi formal dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, untuk pengembangan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat.

Pariwisata halal yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat, hanya pada sebatas; penyiapan makanan/minuman serta hotel saja, (misalnya hotel menyiapkan tempat dan kelengkapan sholat, petunjuk arah/kiblat, serta tempat-tempat umum lainnya dipisahkan antara perempuan dan laki-laki) sedangkan mengenai turis/wisatawan yang berkunjung belum seluruhnya terikat pada pengertian halal, terutama busana yang digunakan oleh wisatawan jika berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, serta faktor transportasi juga belum menunjukkan wisata halal.

Wisata halal dimaksud masih perlu lebih disosialisasikan lagi, terutama ke

negara-negara yang potensial untuk berwisata, sehingga pengertian wisata halal yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat semakin dikenal serta kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat lebih meningkat dan lebih berkualitas. Dapat dipastikan bahwa seluruh proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal di Daerah Nusa Tenggara Barat pada dasarnya digerakkan oleh aktivitas komunikasi informal, komunikasi formal dan koordinasi antar pihak, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara tidak langsung. Kegiatan komunikasi ini terlihat sangat menonjol dan efektif untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wisata halal, dilakukan dengan pendekatan sosial yang berpatokan pada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan komponen pariwisata untuk mengembangkan pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memadai, dan mendapat respon positif dari masyarakat, namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas agar mempunyai daya saing di tingkat global. Selain itu, pariwisata halal yang dikembangkan di Daerah Nusa Tenggara hanya baru sebatas pada produk makanan/minuman yang bersertifikat halal, serta hotel saja, sedangkan pada turis/wisatawan yang berkunjung, belum terikat pada ketentuan halal.

Penyiapan sumber daya manusia di sektor pariwisata baik pada sektor publik maupun swasta perlu semakin berlanjut serta mampu mempunyai daya saing di tingkat global, dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan, serta memberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam event-event internasional. Pemahaman tentang “wisata halal” hendaknya lebih spesifik, sehingga yang dimaksud wisata halal bukan hanya terletak pada penyiapan makanan dan hotel saja, melainkan semakin ditingkatkan dan lebih spesifik, sehingga wisatawan yang berkunjung ke NTB, betul-betul semakin meningkat dan lebih berkualitas. 

## Referensi

Anderson, James E, 1994, Public Policy Making, Second Edition, Houghton Mifflin Company, USA

- Arinkunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendapatn Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Coser, Lewis A. 1971. *Master of Sociological Thought (Ideas in Historical and Social Context)*, Harcourt Brace Jovanovich Publicer, Sandiago Newyork.
- Creswell John. W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Edwards III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc, USA.
- Edward, G, and Sharkansky, I. 1978. *The policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and company
- Ermaya Suradinata, 2013, *Analisis Kepemimpinan – Strategi Pegambilan Keputusan : ASOCA – Ability, Strength, Oppurnitires, Culture, Agility*, Sumedang : Alqaprint Jatinangor
- \_\_\_\_\_, 2013, *Leadership : How To Build Nation – Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*, Jakarta : Lemhanas
- \_\_\_\_\_, 2002, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Vidcodata
- \_\_\_\_\_, 1999, *Filsafat Dan Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Penerbit Ramadan
- \_\_\_\_\_, 1998, *Manajemen Pemeritahan dan Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Ramadan
- Finer, Herman, 1949, *Theory And Practice Of Modern Government – Revised Edition*, New York : Henry Holt And Company
- Gormley, William. T. and Balla, Steven. J. 2004. *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*, Washington: CQ Press.
- Grindle, Merilee S, 1980. *Politics and Policy implementation*, in *The Third World*, New Jersey: Priceton University Press.
- Riduwan, 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta Bandung.
- Muchlis Hamdi, 2013. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syafri, Wirman, 2016, *Implementasi Kebijakan & Pelayanan Publik*, Penulisan Buku Literatur IPDN. Jatinangor.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Manajemen Strategis Sektor Publik*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
- Wahab, Solichin Abdul 2004, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Dokumen / Undang-Undang :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan.
3. Perda. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 2 Tahun 2014, tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013 – 2018.
4. Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Pariwisata Halal.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 51 Tahun 2015, tentang Wisata Halal.

Website :

- Mathieson & Wall (1982), di <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/12/20-pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diunduh tgl. 21-2-2017.
- Swarbrooke (1996) di (file:///C:/Users/SONY/Documents/A.%20Konsep%20Pengembangan%20Pariwisata%20Pengembangan%20Pariwisata%20Merupakan.htm, yang diunduh, tgl 21-2-17)
- (file:///C:/Users/SONY/Documents/Rakornas%20Kepariwisataaan%20ke20Pesona%20Indonesia.htm).
- Sunhadji Rofi'i, Ketua LPPOM MUI di (<http://www.halalmuibali.or.id/?p=56> didownload, tgl 23-2-2017.
- <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/52/nusa-tenggara-barat>)
- <http://www.halalcorner.id/2017/07/puluhan-hotel-dan-restoran-di-lombok-bersertifikat-halal/>(didownload,tgl.11-9-2017).